

**DINAMIKA POLITIK AUSTRALIA PASCA KEMATIAN RATU
ELIZABETH II TERKAIT ISU *REPUBLIC REFERENDUM PLAN***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional



Disusun oleh:

YESICA JANERISA SILALAH

07041282025140

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**DINAMIKA POLITIK AUSTRALIA PASCA KEMATIAN RATU
ELIZABETH II TERKAIT ISU *REPUBLIC REFERENDUM PLAN***

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Yesica Janerisa Silalahi

07041282025140

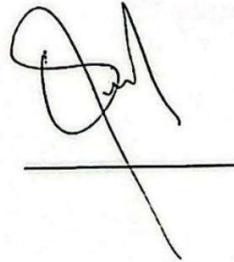
Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Palembang, 14 Juni 2024

Pembimbing I

Ferdiansyah Rivai, S.IP. M.A

NIP. 198904112019031013



Disetujui Oleh,

Ketua Jurusan

Sofyan Nendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

DINAMIKA POLITIK AUSTRALIA PASCA KEMATIAN RATU ELIZABETH II TERKAIT ISU *REPUBLIC REFERENDUM* *PLAN*

SKRIPSI

Oleh:

Yesica Janerisa Silalahi
07041282025140

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 5 Juli 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

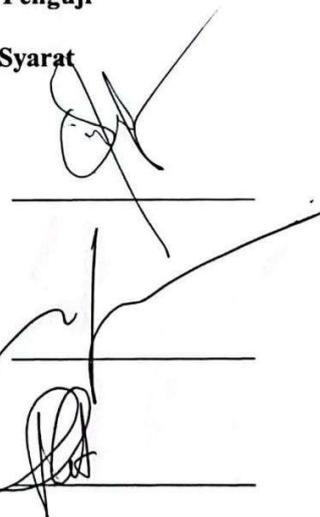
Pembimbing :

Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Penguji :

Abdul Halim S.IP., M.A
NIP. 199310082020121020

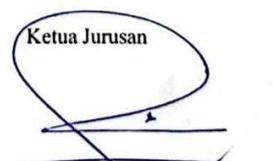
Ramdan Lamato S.Pd., M.Si
NIDN. 199402132022031010



Mengetahui



Ketua Jurusan



Sofyan Effendi S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yesica Janerisa Silalahi
Nim : 07041282025140
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunung Megang, 18 Januari 2002
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Dinamika Politik Australia Pasca Kematian Ratu Elizabeth II Terkait Isu *Republic Referendum Plan*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 14 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Yesica Janerisa Silalahi
NIM. 07041182025140

MOTTO

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

Jesus Christ

“Percayalah kepada Tuhan itu baik dan pasti selalu menyediakan yang terbaik bagi hari depan”

Ps. Gilbert Lumoindong

“Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya”

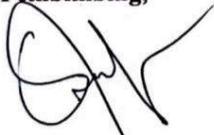
Mahatma Ghandi

ABSTRAK

Kematian Ratu Elizabeth II telah mendorong kembali gerakan republik di Australia. Tujuan penelitian ini untuk melihat dinamika politik Australia pasca kematian Ratu Elizabeth II terkait isu *Republic Referendum Plan*. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan seperti data yang diperoleh dari buku, jurnal, website, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Australia mengalami dinamika yang signifikan terkait perencanaan pelaksanaan referendum mendatang pasca kematian Ratu Elizabeth II. Terdapat *policy influencer* dalam isu tersebut. Pertama, *bureaucratic influencer* terdapat Perdana Menteri Anthony Albanese, menunjuk seseorang Matt Thistlethwaite sebagai *Assistant Minister for Republic*. Kedua, *partisan influencer* terdiri dari partai-partai politik misalnya Partai Buruh Australia dan Partai Liberal Australia. Ketiga, *interest influencer* terdiri dari Gerakan Republik Australia dan Liga Monarki Australia. Keempat, *mass influencer*. Media massa yang kerap berkumandang terkait isu *republic referendum plan* seperti *The Guardians*, *Voice of Australia*, *Britannica*, *The Sydney Morning Herald*, dan *Canberra Times*.

Kata kunci : Referendum, Republik, Monarki

Dosen Pembimbing,



Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Sofyan Effendi, S.IP., M.SI
NIP.197705122003121003

ABSTRACT

The death of Queen Elizabeth II has pushed back the republican movement in Australia. The aim of this research is to look at the dynamics of Australian politics after the death of Queen Elizabeth II regarding the issue of the Republican Referendum Plan. The research methodology used is a qualitative research method in the form of literature study such as data obtained from books, journals, websites, and so on. The research results show that Australian politics is experiencing significant dynamics related to planning for the upcoming referendum following the death of Queen Elizabeth II. There are policy influencers on these issues. First, the bureaucratic influencer, Prime Minister Anthony Albanese, appointed Matt Thistlethwaite as Assistant Minister of the Republic. Second, partisan influencers consist of political parties such as the Australian Labor Party and the Australian Liberal Party. Third, interest influencers consist of the Australian Republican Movement and the Australian Monarchist League. Fourth, mass influencers. The media that often echo the issue of plans for a republican referendum include The Guardians, Voice of Australia, Britannica, The Sydney Morning Herald, and the Canberra Times.

Keywords : Referendum, Republic, Monarchy

Dosen Pembimbing,



**Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013**

**Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirat Nya dan rahmatNya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “**Dinamika Politik Australia Pasca Kematian Ratu Elizabeth II Terkait Isu *Republic Referendum Plan***”. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis memberikan ucapan terimakasih dan doa dengan penuh hormat kepada pihak-pihak yang telah bersedia membantu :

1. Kepada Bapak Ferdiansyah Rivai S.IP., M.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak berkontribusi waktu, tenaga, dan panduan intelektual selama proses penyusunan penelitian ini.
2. Kepada Bapak Abdul Halim S.IP., M.A selaku dosen penguji yang telah berkontribusi memberikan waktu, masukan, dan panduan intelektual terhadap penelitian ini.
3. Kepada Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.A selaku dosen penguji yang telah berkontribusi memberikan waktu, masukan dan panduan intelektual terhadap penelitian ini.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen, Staf, Karyawan Civitas Akademika dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah berkontribusi memberikan bantuan dalam keperluan penulisan penelitian ini.

5. Kepada orangtua, Abang, dan Ani yang telah mendoakan, memberikan dukungan secara moral dan finansial serta memotivasi untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan yang telah mendukung dan memotivasi selama proses penyusunan skripsi.

Akhir kata, penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran nya. Terlebih lagi, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.

Indralaya, Mei 2024

Yesica Janerisa Silalahi
07041282025140

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kerangka Konseptual	20
Teori Policy Influencer	20
2.3 Alur Pemikiran	25
2.4 Argumentasi Utama	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Desain penelitian.....	27
3.2 Definisi Konsep/Teori.....	28

3.3 Fokus Penelitian.....	28
3.4 Unit analisis.....	33
3.5 Jenis dan sumber data.....	34
3.5.1 Jenis Data.....	34
3.5.2 Sumber Data.....	34
3.6 Teknik pengumpulan data.....	34
3.7 Teknik keabsahan data.....	34
3.8 Teknik Analisa Data.....	35
3.9 Jadwal Penelitian.....	35
3.10 Sistematika Penulisan.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	39
4.1 Sejarah Republikanisme di Australia.....	39
4.2 Referendum Republik Australia 1999.....	43
BAB V PEMBAHASAN.....	50
5.1 Beaurucratic Influencer.....	50
5.2 Partisan Influencer.....	55
5.3 Interest influencer.....	59
5.4 Mass Influencer.....	66
BAB VI PENUTUP.....	70
6.1 Kesimpulan.....	70
6.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	28
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1 Unjuk Rasa di Sydney.....	6
Gambar 1.1.2.Konferensi Aborigin Tahun 1967.....	8
Gambar 2.1 Bagan Alur Pemikiran	25

DAFTAR SINGKATAN

ARM	: <i>Australia Republic Movement</i>
AML	: <i>Australian Monarchist League</i>
ACM	: <i>Australians for Constitutional Monarchy</i>
KISPA	: Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara diartikan sebagai suatu subjek yang memiliki sisi keutamaan dan keunggulan dalam hukum internasional (*par excellence*). Perihal ini dapat dilihat dari Kesepakatan Montevideo (Kesepakatan Montevideo, 1993) mengenai Hak dan Kewajiban Negara 1993 yang berisi sebagai berikut : 1) Penduduk yang menetap 2) Daerah *definitive* 3) Pemerintah Berdaulat; beserta 4) Kapasitas ikatan dengan negara lain. Kesepakatan ini sudah disahkan dan diterima secara universal oleh seluruh negara sebagai persyaratan negara didirikan. Sebagai organisasi paling tinggi, negara dapat terbentuk dikarenakan adanya cita-cita individu dan kelompok untuk hidup bersama dan membangun negara yang maju. Oleh sebab itu, negara harus dapat melindungi setiap aspek yang berkaitan dengan kehidupan sebagai suatu kepentingan utama. Tugas dan kewajiban tersebut telah dituangkan dalam Kesepakatan Montevideo sebagai salah satu subyek hukum internasional yang sangat penting.

Banyak negara yang saling menjalin hubungan dengan negara lain. Hal ini sangat penting mengingat negara saling membutuhkan. Di era modern, pembaharuan selalu terjadi. Begitu pula dengan kumpulan manusia yang menjadi cikal bakal lahirnya negara. Kemajuan yang mendasari pola pikir manusia semakin pesat. Antarindividu pun saling menjalin relasi guna saling melengkapi. Begitupun dengan negara yang satu dengan negara lainnya. Seperti hubungan Inggris dengan Australia yang tercipta sejak datangnya bangsa Inggris ke benua Australia (Kurniawan, 2020). Kedatangan Inggris ke benua tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri Inggris yang kala itu sedang berkembang pesat. Inggris melaksanakan politik imperialisme secara modern atau dapat disebut juga sebagai imperialisme industri (Putri &

Pahlevi, 2022). Berkembangnya zaman mengiring manusia untuk semakin berinovasi dan bekerja sama. Keberadaan benua Australia membuat Inggris ingin selalu mempertahankan benua tersebut sehingga di tahun 1900 pada tanggal 9 Juli, Australia menjadi Negara Pesemakmuran Inggris. Hal ini dibuktikan dari penandatanganan *Royal Commission of Assent* oleh Ratu Victoria. Peristiwa tersebut sebagai tanda momentum penetapan konstitusi dari negara tersebut. Di tahun berikutnya, Australia resmi mempunyai parlemen setelah Ratu Victoria menandatangani pengesahan konstitusi. Meskipun demikian, pengesahan dari Undang-Undang Konstitusi Pesemakmuran Australia yang dilaksanakan melalui Majelis Rendah Inggris di tahun 1900 tetap merupakan suatu cikal bakal dari terbentuknya pemerintahan Australia. Konstitusi Australia dimulai dengan adanya Persetujuan dan Proklamasi Kerajaan yang saat itu dipimpin oleh Ratu Victoria dengan *Duke of Cornwall* dan *York* sebagai wakil monarki yang diadakan di gedung Pameran, Melbourne, pada pembukaan Parlemen Federal pertama di tanggal 9 Mei 1901 (Intermezzo, 2023).

Australia menjadi negara Pesemakmuran Inggris di mana Persemakmuran Bangsa-Bangsa (The Commonwealth Network, 2020), sebelumnya Persemakmuran Bangsa-Bangsa Inggris (1931–1949) sendiri merupakan satu asosiasi bebas negara-negara berdaulat yang terdiri dari Inggris dan sejumlah bekas dependensinya yang telah memilih untuk mempertahankan ikatan persahabatan dan kerja sama praktis dan mengakui raja Inggris sebagai kepala simbolis. Relasi negara Inggris dengan negara pesemakmurannya, yaitu Australia sebagai warisan penjajahan cukup erat hingga membawa hubungan kedua negara terjalin hingga sekarang.

Selama kepemimpinan Ratu Elizabeth II terdapat persoalan yang datang dari negara pesemakmuran yang loyal ini, yakni Australia. Negara ini mengalami pertikaian internal antara

House of Senate dan *House of Representative* mengenai anggaran pemerintah sehingga hal ini memicu Perdana Menteri Australia yang bernama Gough Whitlam diberhentikan oleh seorang Gubernur Jenderal Sir John Kerr (BBC , 2020). Whitlam kemudian digantikan oleh Malcolm Fraser. Hal ini memicu Whitlam menggunakan kesempatan dari persoalan tersebut untuk menimbulkan sentimen rakyat terhadap Ratu Elizabeth II dengan menyebarkan isu bahwa Gubernur Jenderal Sir John Kerr berniat untuk menghancurkan demokrasi di dalam pemerintahan Australia karena beliau selaku perwakilan Ratu Elizabeth II. Walaupun sebenarnya kasus ini tidak ada kaitannya dengan Ratu Elizabeth II. Adanya kasus tersebut menarik perhatian rakyat Australia sehingga mereka melakukan demonstrasi selama diadakannya kunjungan dari ratu Elizabeth II di tahun 1977. Menyikapi hal ini, Ratu Elizabeth II tetap bertindak netral dengan tidak berpartisipasi dalam kasus internal negara manapun bahkan negara pesemakmuran. Walaupun tetap jadi pihak yang disalahkan, Ratu Elizabeth II tetap meyakini bahwa adanya kecintaan rakyat terhadap dirinya.

Di istana Balmoral, Skotlandia Ratu Elizabeth II menghembuskan nafas terakhirnya bertepatan tanggal 8 September 2022 setelah berkuasa selama 70 tahun (DW, 2022). Pengumuman kematian beliau sangat menarik atensi dunia. Begitu banyak yang berpendapat mengenai kematiannya. Dari belasungkawa hingga kontroversial pun marak terjadi. Hal inipun tidak dapat dilepaskan dari negara yang dikuasai. Dari Inggris negara pesemakmuran hingga internasional terkena dampak dari peristiwa ini. Setelah kematian Ratu Elizabeth II timbul kembali isu mengenai pemisahan diri Australia dari Inggris. Hal ini dikarenakan keinginan Australia untuk merdeka ‘sepenuhnya’ dan mereka melihat tidak ada lagi relevansi Inggris terhadap Australia sehingga rakyat Australia mendorong isu untuk hengkang dari Inggris agar segera dilaksanakan. Naiknya Raja Charles sebagai Raja, perubahan hubungan antara Inggris

dengan Australia nampak dari desakan hengkang yang muncul kembali pasca kematian Ratu Elizabeth II. Diketahui bahwa banyak negara pesemakmuran ingin memisahkan diri dari Inggris dikarenakan masih merasa menjadi negara koloni. Polemik setelah Raja Charles naik takhta yang paling menonjol yaitu runtuhnya persatuan koloni (CNN Indonesia, 2022). Mangkatnya Ratu Elizabeth yang sangat dicintai dan aksesi Charles yang kurang populer dapat meningkatkan kampanye pro- republik di negara-negara pesemakmuran, di mana sejak lama bergemuruh perdebatan tentang pemutusan hubungan dengan takhta Inggris (Mecher, 2023).

Peristiwa ini memunculkan dinamika politik lokal dari negara pesemakmuran. Dinamika politik sendiri merupakan sebuah keadaan dimana terdapat sebuah proses perubahan, interaksi, ataupun konflik dalam politik dan masyarakat di suatu negara. Hal ini juga mencakup hubungan pemerintah dengan masyarakat, persaingan antarpantai politik, perubahan kebijakan, dinamika kekuasaan antar lembaga politik. Menurut Leo Agustoni (2009:62), dinamika politik adalah proses demokrasi dimana memiliki dua komponen dasar yaitu partisipasi dan demokrasi. Partisipasi merupakan keikutsertaan dalam melaksanakan agenda-agenda pemerintah dan pemerintah merupakan medium sementara demokrasi merupakan sistem kekuasaan dalam konsep kemasyarakatan. Menurut Dwiyanto (2002:110), dinamika politik merupakan gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Adanya dinamika politik memberikan informasi mengenai pergeseran isu politik yang sedang terjadi dalam pemerintah. Jadi, dinamika politik diartikan sebagai sebuah proses pergerakan politik dalam pemerintah.

Dinamika politik lokal Australia mengalami pasang surut selama menjadi negara monarki. Keinginan untuk lepas dari kesatuan negara monarki Inggris sudah sering terjadi sejak

masa kepemimpinan Ratu Victoria. Australia memperjuangkan republik untuk konstitusi pemerintahannya. Kata ‘republik’ sudah ada sejak abad ke-16 yang berasal dari sebuah bahasa Perancis yakni ‘*republique*’ di mana kata tersebut berasal dari bahasa latin yakni ‘*respublica*’, dengan *res* adalah kepentingan, *publica* adalah publik (Horowitz, 2005). Bila digabungkan *respublica* bermakna kepentingan publik. Di era modern, republik merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang tidak memiliki raja atau dinasti sebagai pemimpin negara dengan masyarakat sebagai bawahannya. Republik berkaitan erat dengan kata kebebasan. Kebebasan memberikan hak pada masyarakat untuk mengatur diri sendiri hingga akhirnya menjadi kekuatan bagi rezim republik.

Perdana Menteri Australia saat ini yaitu Anthony Albanese mengatakan seputar janjinya saat kampanye di tahun 2022 yakni mengenai perubahan konstitusi Australia dari monarki menjadi republik untuk tiga tahun mendatang (Abc Australia, 2022). Kampanye tersebut membawa kembali gerakan republikanisme di Australia. Bersama dengan Matt Thistlethwaite, seorang *Assitant Minister for Republic* yang ditunjuk oleh Albanese, berencana untuk berdiskusi mempersiapkan referendum republik mendatang. Bagi Matt, Australia merupakan negara independen yang memiliki budaya dan identitas tersendiri. Saat ini, Thistlethwaite memfokuskan energinya untuk mendidik masyarakat Australia terutama generasi muda beserta komunitas multikultural yang cenderung apatis tentang konstitusi negaranya. Ia yakin bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat Australia selama 20 tahun terakhir dapat membantu menyukseskan referendum berikutnya. Albanese dan Matt sendiri berasal dari Partai Buruh Australia memperkenalkan kembali konstitusi republik. Hal ini juga didukung dari Partai Republik Australia yang selama ini mengusung gerakan republikanisme. Pasca kematian sang Ratu, Adam Bandt dari Partai Hijau mengucapkan belasungkawa sekaligus memberikan

pendapatnya kepada khalayak untuk berdiskusi perihal republik. Gerakan Republik Australia pun tidak diam saja. Mereka melakukan aksi unjuk rasa ‘Hapuskan Monarki’ di Sydney, pada 22 September 2022 di hari berkabung nasional Ratu Elizabeth II. Gerakan ini banyak terdiri dari aktifis Partai Buruh Australia. Sejak dahulu, gerakan ini telah mengusung ide republikanisme. Iklim politik dan budaya politik Australia berkesempatan membentuk sebuah gerakan republikanisme. Gerakan ini berupaya untuk menggalang kekuatan rakyat demi mengubah sistem politik monarki menjadi republik (Voa, 2016).



Gambar 1.1.1 Aksi Unjuk Rasa Hapuskan Monarki’ di Sydney

(Sumber : (MC, 2022))

Melepas Australia dari Inggris bukanlah hal yang mudah. Seperti kegagalan referendum republik di tahun 1999 (Media Indonesia, 2017), menunjukkan bahwa banyak warga Australia yang masih menghargai sistem monarki. Liga Monarki Australia memiliki kecintaan terhadap sang Ratu juga mendorong pertentangan terhadap republik. Mereka selalu berupaya untuk melindungi citra monarki konstitusional hingga saat ini. Faktor budaya politik dari masyarakat Australia yang tetap menghargai sistem monarki dan secara rasional tidak melihat adanya

relevansi dan signifikansi republikanisme sebagai alternatif untuk landasan kehidupan politik yang telah dijalani selama bertahun-tahun menyebabkan reproduksi sistem politik tersebut. John Howard dari Partai Liberal Australia, seorang Perdana Menteri di tahun 1999, menuangkan pendapatnya dalam (Howard, 1999) transkrip Perdana Menteri mengapa ia memilih 'No' dalam referendum. Ia berpendapat bahwa sistem monarki sudah menciptakan stabilitas bagi Australia. Dengan adanya perubahan konstitusi dikhawatirkan dapat menghilangkan stabilitas tersebut. John percaya bahwa Australia sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat yang telah diakui oleh komunitas dunia. Pasca kematian Ratu, Peter Dutton seorang mantan Menteri Pertahanan Australia yang vokal dari Partai Liberal, merupakan tokoh yang sependapat dengan John Howard mengenai penolakan sistem republik. Baginya, stabilitas dan transisi dalam sebuah monarki merupakan suatu keberhasilan dan belum ada kepastian mengenai keberhasilan saat republik sudah ditetapkan. Terlebih lagi, Dutton melihat kematian Ratu Elizabeth II dimanfaatkan oleh Partai Buruh untuk mencari keuntungan politik terkait simbol mata uang (Karp, 2022).

Demi mencapai kemenangan referendum, Albanese percaya adanya suara dari *First Nation* akan sangat mendukung pencapaian tersebut. Oleh sebab itu, Albanese dan Matt lebih memprioritaskan hal ini ketimbang referendum republik (FitzGerald, 2024). Tetapi, hingga saat ini keberadaan mereka masih belum diakui, seperti yang dilihat dari peristiwa kegagalan referendum *The Voice* tahun lalu. Hasil referendum menunjukkan sebanyak 60% orang menolak keberadaan mereka (Sarwindaningrum, 2023). Hingga saat ini Aborigin masih belum menerima hak-hak nya sebagai bangsa pertama di Australia. Albanese mengucapkan bahwa cukup sulit untuk memisahkan diri dari Inggris ketika pemenuhan janji terhadap *first nation* belum

terlaksana. Keberadaan mereka harus diperhitungkan walaupun banyak pihak yang menentang mereka. Sehingga perubahan konstitusi pun dapat terwujud.



Gambar 1.1.2 Unjuk Rasa terhadap Reformasi Masyarakat Adat

(Sumber : (Voa Indonesia, 2023))

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka pertanyaan penelitian yang diangkat penulis ialah:

**“ Bagaimana Dinamika Politik Australia Pasca Kematian Ratu Elizabeth II
Terkait Isu *Republic Referendum Plan*?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana Dinamika Politik Australia Pasca Kematian Ratu Elizabeth II Terkait Isu *Republic Referendum Plan*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yakni, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana Dinamika Politik Australia Pasca Kematian Ratu Elizabeth II Terkait Isu *Republic Referendum Plan*.
- Penelitian ini dapat menjadi sumbangan referensi di bidang pendidikan bagi pembaca untuk bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Pengajar

Penelitian ini menjadi informasi bagi pengajar untuk mengetahui bagaimana Dinamika Politik Australia Pasca Kematian Ratu Elizabeth II Terkait Isu *Republic Referendum Plan*.

- Mahasiswa

Penelitian ini menjadi saran dan kritik terhadap mahasiswa untuk lebih mengetahui studi kasus seperti bagaimana Dinamika Politik Australia Pasca Kematian Ratu Elizabeth II Terkait Isu *Republic Referendum Plan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Quick & Garran. (1901). *Kontitusi Beranotasi Pesemakmuran Australia*.
- Abc Australia. (2022, Juni 3). *Partai Buruh Janji Perjuangkan Australia Jadi Republik Terlepas dari Inggris*. Diambil kembali dari Detik News: <https://news.detik.com>
- Abyan, Lutfi, & Tangkilisan. (2018). Gerakan Republikanisme dan Dinamika Masyarakat Australia 1998-1999. 550-566.
- ALP. (2024). *Working for Australia*. Diambil kembali dari Australia Labour Party : <https://www.alp.org.au>
- AML. (2024). *Our Monarcy*. Diambil kembali dari Australia Monarchist League: <https://www.monarchist.org.au>
- ARM. (2024). *A Republic*. Diambil kembali dari Australia Republic Movement: <https://republic.org.au>
- ARM. (t.thn.). *Submission to Australian Senate Legal and Constitutional References Committee Inquiry into an Australian Republic*.
- Azmi & Dirgantara. (2023). Policy Influencer dalam Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Pencari Suaka Pada Masa Pemerintahan Julia Gillard. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Vol.4 No. 1*, 40-51.
- BBC . (2020, Juli 14). *Gough Whitlam: Surat-surat menunjukkan Ratu tidak diberitahu sebelumnya tentang pemecatan PM Australia*. Diambil kembali dari https://www-bbc-com.translate.google/news/world-australia-53386554?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true
- Butler. (2023, Oktober 5). *Para Sejarawan Mendesak Warga Australia untuk Berada 'Di Sisi Kanan Sejarah' Ketika Mereka Memberikan Suara dalam Referendum*. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com>
- CNN Indonesia. (2022, September 9). *Apa yang Terjadi Setelah Ratu Elizabeth Meninggal Dunia?* Diambil kembali dari <https://www.cnnindonesia.com>
- Coplin. (1971). *Introduction to International Politics*. Chicago: Markham Publishing Company.
- Dutton. (1994). *Australia and the Monarcy : A Symposium*.
- Dutton. (1994). *Out in the Open : An Autobiography*.
- DW. (2022, September 8). *Ratu Elizabeth II Meninggal Dunia*. Diambil kembali dari <https://www.dw.com/id/ratu-elizabeth-ii-meninggal-dunia/a-63063068>
- Ferarto. (2017). Peran Media Massa Terhadap Perubahan Kebijakan Perancis : Kasus Paris Attack 2015. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol. 6 No.2*, 245-258.

- FitzGerald. (2024, Januari 8). *Australia Puts Republic Referendum Plan on Hold*. Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbcnews.com>
- Freedom House. (2023). *Kebebasan di Dunia 2023*. Diambil kembali dari freedomhouse.org
- Grattan, M. (2023, Oktober 14). *Pemandangan dari The Hill: Anthony Albanese berjanji untuk terus 'mendorong rekonsiliasi' meski mengalami kekalahan telak dalam referendum*. Diambil kembali dari The Conversation: theconversation.com
- Hartcher, P. (2022, September 10). *Why Albanese won't race to a republic following Queen's death* . Diambil kembali dari The Sydney Morning Herald: smh.com.au
- Horowitz. (2005). *New Dictionary of the History of Ideas Vol.5*. Detroit: Charles Scribner's Sons.
- Howard. (1997, Maret 26). *Debat Parlemen Pesemakmuran (Dewan Perwakilan Rakyat)*.
- Howard. (1999, 10 27). *Transcripts PM 'Referendum'*. Diambil kembali dari Australian Government: pmtranscript.pmc.gov.au
- Hunter, F, Snow, D, & Massola, J . (2016, Desember 16). *Dukungan mayoritas di Parlemen untuk sebuah republik, klaim Gerakan Republik Australia*. Diambil kembali dari The Sydney Morning Herald: <https://www.thesydenymorningherald.com>
- Intermezzo. (2023, Juli 9). *Pesemakmuran Australia Dibentuk* . Diambil kembali dari Media Indonesia: <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-5566>
- Ishom. (2016). Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (Studi Gerakan Solidaritas Palestina di Indonesia). *Jurnal Politik Muda Vol. 5 No.2*, 13-197.
- Jamil . (2017). Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Counter Terrorism Pada Masa Kepemimpinan Barack Obama. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 4 No.2*, 1-15.
- Karp. (2022, September 15). *Peter Dutton Mengecam Kaum Republikan yang Mencari 'Keuntungan Politik' dari Kematian Ratu*. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com>
- Karp, P. (2023, May 3). *Anthony Albanese says an Australian republic referendum is not 'imminent' in Piers Morgan interview*. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com>
- Kesepakatan Montevideo. (1993).
- Kirby. (1900). *A Centenary Reflection on the Australian Constitution: The Republic Referendum 1999*. Diambil kembali dari Constitutions of the Commonwealth of Australia Act: <https://www.hcourt.gov.com>
- Knott, M & Koziol, M. (2022, January 13). *Keating blasts new republic proposal as dangerous 'US-style presidency'*. Diambil kembali dari The Sydney Morning Herald : <https://www.smh.com.au> ›
- Kompasiana. (2015, Juni 24). *Sejarah Gerakan Republikanisme Australia: "This is the Real Our Australia"* . . Diambil kembali dari <https://www.kompasiana.com>

- Kurniawan. (2020). Kondisi Australia Prakolonial (Sebelum Kedatangan Bangsa Inggris). *Jurnal Candi Vol.20 No.1*, 46-56.
- Liberal. (2024). *Standing up for Hard Working Australians*. Diambil kembali dari Liberal Party of Australia: <https://www.liberal.org.au>
- Marbun. (1992). Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis. Dalam W. Kashmir & Coplin, *Introduction to International Politics*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- MC. (2022, November 10). *'Salah satu milik kita': Australia merencanakan referendum mengenai monarki*. Diambil kembali dari Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com>
- Mecher. (2023, Mei 5). *Penobatan Raja Charles III Picu Perdebatan tentang Bentuk Monarki Konstitusional di Australia*. Diambil kembali dari Voice of America: <https://www.voaindonesia.com>
- Media Indonesia. (2017, November 6). *1999: Australia Tolak Jadi Republik*. Diambil kembali dari <https://mediaindonesia.com>
- Nationals. (2024). *What The Nationals Stand For*. Diambil kembali dari The Nationals: <https://nationals.org.au>
- Newspoll. (2004, January 6). *Would you like or not like to see a new referendum to decide whether or not Australia should become a republic in 2004?* Diambil kembali dari Sunday Telegraph: <http://www.Newspoll.com>
- Nugraha. (2022). Upaya Gerakan Republikan Australia Dalam Memperjuangkan Republik Pada Tahun 1998-1999. *Thesis*, 1-11.
- Orr. (2023, July 7). *Only eight of Australia's 44 referendums were a Yes. Here's what they were*. Diambil kembali dari SBS News: <https://www.sbs.com.au/news/article/only-eight-of-australias-44-referendums-were-a-yes/7c7o5nfsg>
- Putri & Pahlevi. (2022). Masuknya Inggris ke Australia dan Dampaknya Bagi Suku Aborigin. *Jurnal UM Palembang : Danadyaksa Historica 2 Vol.2*, 197-101.
- Ritchie, H. (2023, Oktober 14). *The Voice: Australians vote No in historic referendum*. Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-australia-67110193>
- Rowlands, L. (2023, Oktober 15). *Indigenous Australians call for 'week of silence' after referendum failure*. Diambil kembali dari Al Jazeera : <https://www.aljazeera.com>
- RPA. (2024). *Peter Consandine: Australian Grassroots Republican*. Diambil kembali dari RPA Republic: <https://therepublicans.com.au>
- Sarwindaningrum. (2023, Oktober 15). *Aborigin Ratapi Hasil Referendum Yang Menolak Akui Suku Pribumi*. Diambil kembali dari Kompas: <https://www.kompas.id>

The Commonwealth Network. (2020). *The Commonwealth* . Diambil kembali dari https://www-commonwealthofnations-org.translate.google.com/commonwealth/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

The Crown. (2021, Februari 11). *Support for Australian Republic Falling*. Diambil kembali dari <https://www.thecrown.org.au>

The Greens. (2024). *Our Movement* . Diambil kembali dari Australian Greens : <https://greens.org.au>

Vemby & Iskandar . (2017). Motivasi Swiss Melakukan Referendum Imigrasi Pada Tahun 2014. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No.1*, 1-8.

Voa. (2016, Januari 26). *Pemerintah Australia Didesak Putuskan Hubungan dengan Inggris*. Diambil kembali dari Voice of America: <https://www.voaindonesia.com>

Voa Indonesia. (2023, Juli 2). *Ribuan Orang Berunjuk Rasa di Seluruh Australia untuk Mendukung Reformasi Masyarakat Adat* . . Diambil kembali dari <https://www.voaindonesia.com>